

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KET.

18

FORM 2 :

**REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PENGELOLAAN KEARSIPAN SKPD/UKPD**

I. NAMA SKPD/UKPD :
WILAYAH :

II. TANGGAL PELAKSANAAN :

III. TIM EVALUASI

:	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

IV. HASIL EVALUASI

:

--

V. REKOMENDASI

:

--

VI. RENCANA TINDAK LANJUT

:

--

Jakarta, 2018

PESERTA

TIM EVALUASI

.....
NIP

.....
NIP

TEMBUSAN :

1. PIMPINAN UK I
2. PIMPINAN UK II

FORM 3 FEED BACK :

KOMITMEN

PERBAIKAN BERKELANJUTAN PENGELOLAAN KEARSIPAN SKPD/UKPD

I. NAMA SKPD/UKPD :
WILAYAH :

II. TANGGAL KOMITMEN :

III. NAMA PEMBUAT KOMITMEN :

IV JABATAN PEMBUAT KOMITMEN

IV. REKOMENDASI :

V. RENCANA TINDAK LANJUT :

VI. KOMITMEN PERBAIKAN
PENGELOLAAN KEARSIPAN :

Jakarta, 2018

PEMBUAT KOMITMEN
PIMPINAN UK/UP

.....
NIP

TEMBUSAN :

1. PIMPINAN UK I
2. PIMPINAN UK II

FORM 1 :

**IDENTIFIKASI MASALAH KEARSIPAN
ASPEK PENGELOLAAN ARSIP AKTIF, INAKTIF, VITAL, TERJAGA**

- I. NAMA SKPD/UKPD :
WILAYAH :
- II. TANGGAL PELAKSANAAN :
- III. NAMA PETUGAS IDENTIFIKASI :
- IV ASPEK-ASPEK IDENTIFIKASI : ya tidak
- 1 PENGELOLAAN KEARSIPAN DINAMIS :
1. Tersedia Surat Keputusan Pejabat pengelola kearsipan
 2. Prosedur persuratan :
 - a. Pengelolaan surat masuk
 - b. prosedur Pembuatan
 - c. Prosedur surat keluar
 - d. ketepatan penggunaan lembar disposisi
 3. penggunaan perbal
 4. klasifikasi
 5. tata cara penyimpanan
 6. Penyusutan arsip
- 2 PENGELOLAAN ARSIP IN AKTIF
1. Pemindahan dari filing kabinet ke Box Arsip
 2. Sudah sesuai Dosir
 3. sudah di indeksing
 4. sudah dibuatkan Daftar Arsip

Jakarta,

PEMBUAT

PIMPIN/

.....
NIP

TEMBUS/

1. INAN UK I
2. NAN UK II

..... 2018

KOMITMEN

AN UK/UP

.....
.....

form : KATEGORI I

No	SKPD	Kategori					
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Buruk	
1	Dinas Kebersihan				V		1
							2
							3
							4
							5
							6
2	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan		V				1
							2
							3
3	Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan					V	1
							2
							3
							4
							5
4	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			V			1

							2
							3
5	Dinas Perindustrian dan Energi				V		1
							2
							3
							4
							5
							6
6	Dinas Tata Air					V	1
							2
							3
							4
							5
							6
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				V		1

							2
							3
							4
							5
8	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal				V		1
							2
							3
							4
9	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah				V		1
							2
							3
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				V		1
							2
							3

							4
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan					V	1
							2
							3
							4
							5
							6
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		V				1
							2
							3
13	Badan Kepegawaian Daerah			V			1
							2
							3

							4
							5
14	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa					V	1
							2
							3
							4
15	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah					V	1
							2
							3
							4
							5
							6
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				V		1
							2

							3
							4
							5
							6
17	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta				V		1
							2
							3
							4
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana					V	1
							2
							3
							4
							5
19	Biro Kesejahteraan Sosial					V	1
							2

							3
							4
							5
							6
							7
20	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta				V		1
							2
							3
							4
							5
21	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual					V	1
							2
							3
							4
							5
							6

22	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta						1
							2
							3
							4
							5
							6
23	Biro Perekonomian				V		1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
24	Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah					V	1
							2

							3
							4
							5
							6
25	Kota Administrasi Jakarta Barat					V	1
							2
							3
							4
							5
26	Kota Administrasi Jakarta Selatan			V			1
							2
							3
							4
27	Kota Administrasi Jakarta Utara					V	1
							2
							3

							4
							5
							6
							7
28	Kota Administrasi Jakarta Pusat			V			1
							2
							3
29	Kota Administrasi Jakarta Timur			V			1
							2
							3
							4
							5
30	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				V		1
							2
							3
							4

							5
31	Dinas Kesehatan			V			1
							2
							3
							4
32	Dinas Pendidikan					V	1
							2
							3
							4
							5
33	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda				V		1
							2
							3
							4
							5
34	Dinas Tata Ruang					V	1
							2
							3
							4

							5
35	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					V	1
							2
							3
36	Biro Hukum				V		1
							2
							3
							4
							5
37	Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri				V		1
							2
							3
							4
							5
38	Dinas Bina Marga				V		1
							2
							3
							4
39	Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta		V				1

40	Sekretaris Dewan				V		1
							2
							3
							4
41	Satuan Polisi Pamong Praja						1
							2
							3
							4

HASIL PENGAWASAN

Keterangan
<p>Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital</p> <p>Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta masih kurang dalam pemeliharaan arsip in aktif</p> <p>Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta masih kurang dalam melakukan layanan dan akses terhadap arsip dinamis SKPD</p> <p>Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip</p> <p>Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki 5 (lima) orang tenaga pengelola arsip yang kesemuanya berasal dari tingkatan SLTA sedangkan formasi menurut Pergub. 134/2014 adalah 10 orang</p> <p>Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta belum memiliki sarana dan prasarana kearsipan berupa gedung record center</p>
<p>Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta masih kurang optimal dalam pemeliharaan arsip in aktif.</p> <p>Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.</p> <p>Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta memiliki arsip kepulauan dan arsip perbatasan namun belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta;</p>
<p>Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip in aktif hanya saja belum membuat daftar arsip (DA), peralatan sudah cukup memadai seperti sudah adanya folder/odner, sekat/guide, filing cabinet/lemari arsip serta ruang penyimpanan arsip aktif (central File)</p> <p>Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan arsip</p> <p>Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan belum memiliki jenis arsip, belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal</p> <p>Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif, belum pernah melakukan fumigasi, pemberian kamper, pest control, pengaturan suhu ruangan dan belum ada penataan boks arsip dalam rak arsip dan ruang record center tersendiri</p>
<p>Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip aktif sesuai dengan kaedah kearsipan akan tetapi belum membuat Daftar Arsip</p>

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan arsip

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta belum memiliki jenis arsip terjaga, belum melakukan penataan, belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan akan tetapi belum membuat Daftar Arsip

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusunan daftar arsip vital dan penggunaan sarana penyimpanan, sedangkan metode perlindungan belum adanya peralatan khusus (vaulting) serta belum adanya program penyelamatan dan pemulihan penataan dan penyimpanan arsip apabila terjadi bencana

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki jenis arsip terjaga sehingga belum dapat melaporkan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam pemeliharaan arsip in aktif. Hal tersebut diantaranya belum adanya fumigasi, pemberian kamper, pest control, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alihmedia

Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip

Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan arsip in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan, belum melakukan indeksing, koding, tajuk silang, sitem penataan arsip, penempatan file pada posisinya, daftar arsip serta peralatan masih kurang memadai seperti belum adanya sekat/guide.

Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi kebakaran

Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki arsip terjaga yaitu arsip kewilayahan dan arsip pemerintahan yang strategis sehingga sampai saat ini belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta;

Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta masih kurang dalam melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal

Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta masih kurang optimal dalam pemeliharaan arsip in aktif, yaitu fumigasi, pemberian kamper, pest control dan pengaturan suhu ruangan

Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan namun belum melakukan indeksing, koding, tanjuk silang, labeling serta penyampaian daftar arsip aktif ke PPID

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan, penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi kebakaran

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki arsip terjaga sehingga belum melakukan pengolahan dan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta;

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal. Hanya saja belum ada pendeskripsian dan manuver arsip

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi DKI Jakarta kurang optimal dalam pemeliharaan arsip in aktif. Hal tersebut diantaranya belum ada fumigasi, pest control, pengaturan suhu ruangan, file alarm system sprinle penataan boks arsip dalam rak arsip dan ruang record center tersendiri

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal belum melaksanakan penataan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal memiliki arsip terjaga akan tetapi belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal sudah melakukan pemeliharaan arsip in aktif walaupun tidak maksimal karna belum melakukan fumigasi

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal belum melakukan penyusutan arsip.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan penataan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki arsip terjaga walaupun hanya arsip kewilayahan dan arsip masalah pemerintahan yang strategis sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta belum menggunakan sarana penyimpanan metode perlindungan, belum menggunakan peralatan khusus pengamanan arsip vital serta belum adanya penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki arsip terjaga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sudah cukup maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif hanya belum ada penataan boks arsip dalam rak, rak arsip dan ruang record center tersendiri

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip dinamis aktif dan in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan hanya saja belum membuat daftar arsip dan belum adanya penyampaian daftar arsip in aktif ke PPID

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki arsip terjaga sehingga belum pernah melakukan penataan serta pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan pemeliharaan arsip in aktif seperti belum adanya tabung pemadam kebakaran dan sprinkle , rak arsip dan ruang record center tersendiri

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam melakukan layanan dan akses terhadap arsip dinamis SKPD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan pengelolaan arsip vital diantaranya belum adanya penataan arsip vital, metode perlindungan, pengamanan arsip, peralatan khusus penyimpanan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi DKI Jakarta memiliki arsip terjaga diantaranya arsip kependudukan dan arsip kontrak karya namun belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan hanya saja belum melakukan taju silang, daftar arsip, kreatifitas belum ada seperti belum adanya kode warna yang menandai klasifikasi tertentu

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki arsip terjaga walaupun hanya arsip kewilayahan dan arsip masalah pemerintahan yang strategis sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif hanya belum ada penataan boks arsip dalam rak, rak arsip dan ruang record center tersendiri

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan hanya saja belum membuat daftar arsip in aktif.

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta belum memiliki arsip terjaga walaupun hanya arsip kewilayahan dan arsip masalah pemerintahan yang strategis sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta belum melakukan pemeliharaan arsip in aktif dikarenakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta SKPD baru .

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan arsip in aktif yang sesuai dengan kaedah kearsipan belum melakukan daftar arsip, peralatan sudah memadai seperti sudah adanya sekat/guide, filing cabinet/lemari arsip serta ruang penyimpanan arsip dinamis aktif dan in aktif (central File)

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki arsip terjaga sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta masih kurang maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif belum melaksanakan asas preventif serta belum membuat daftar arsip hasil alihmedia

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan hanya saja belum melakukan tajuk silang, penataan file belum pada posisinya, belum adanya berkas aktif, daftar isi berkas serta belum menyampaikan daftar arsip in aktif ke PPID.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki arsip perjanjian internasional namun belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif hanya belum ada penataan fumigasi, pest control, pengaturan suhu ruangan, berita acara alihmedia, daftar arsip hasil alihmedia dan ruang record center tersendiri

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan penataan arsip vital, akan tetapi belum adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki arsip terjaga walaupun hanya arsip kewilayahan dan arsip masalah pemerintahan yang strategis sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan pemeliharaan arsip in aktif walaupun tidak maksimal karna tidak adanya pengatur suhu ruangan dan pelaksanaan alih media

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan arsip aktif diantaranya belum melakukan, koding, tunjuk silang, labeling, serta belum terlaksananya mekanisme serah/pindah arsip dari unit pencipta ke unit pengolah

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam pengelolaan arsip vital diantaranya belum tersedianya peralatan khusus penyimpanan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta belum memiliki arsip terjaga sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta masih kurang maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Biro Kesajahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan arsip aktif secara optimal diantaranya belum melakukan penataan berkas terlaksananya mekanisme serah/pindah arsip dari unit pencipta ke unit pengolah

Biro Kesajahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam pengelolaan arsip vital diantaranya belum tersedianya peralatan khusus penyimpanan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Biro Kesajahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki arsip perjanjian internasional namun belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Biro Kesajahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal

Biro Kesajahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta masih kurang maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif

Biro Kesajahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta masih kurang dalam melakukan layanan dan akses terhadap arsip dinamis SKPD

Biro Kesajahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan hanya saja belum membuat daftar arsip, peralatan belum memadai seperti belum adanya sekat/guide, filing cabinet/lemari arsip serta ruang penyimpanan arsip aktif (central File)

Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memiliki arsip perjanjian internasional namun belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta sudah cukup maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif hanya belum ada penataan boks arsip dalam rak, rak arsip dan ruang record center tersendiri

Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip aktif sesuai dengan kaedah kearsipan hanya saja belum membuat daftar arsip, peralatan belum memadai seperti belum adanya sekat/guide dan tampilan kreativitas

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta belum memiliki arsip terjaga sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta masih kurang maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif belum ada preventif fumigasi, pemberian kamper, pest control, pengaturan suhu ruangan, fire alarm system, hydran, tabung pemadam kebakaran,spinkle dan pembuatan berita acara alihmedia serta daftar arsip hasil alihmedia

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta masih kurang dalam melakukan layanan dan akses terhadap arsip dinamis SKPD

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta melakukan penyusutan arsip.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penataan arsip in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan hanya saja belum melakukan tunjuk silang, labeling, penataan arsip dan daftar arsip aktif, peralatan belum memadai seperti belum adanya sekat/guide, filing cabinet/lemari arsip serta dari segi tampilan belum adanya kreativitas yang dilakukan oleh pngelola.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki arsip kewilayahan dan arsip kepulauan namun belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta masih kurang melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta sudah cukup maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif hanya belum ada penataan pemilahan, pendiskripsian, manuver, penomoran dan labeling

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip

Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan arsip in aktif sehingga belum sesuai dengan kaedah kearsipan seperti belum adanya indeksing, labeling, penataan berkas, daftar arsip in aktif seta kreativitas.

Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta belum memiliki arsip terjaga walaupun hanya arsip kewilayahan dan arsip masalah pemerintahan yang strategis sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal

Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta sudah cukup optimal dalam pemeliharaan arsip in aktif hanya belum ada penataan boks arsip dalam rak, rak arsip dan ruang record center tersendiri

Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta masih kurang dalam melakukan layanan dan akses terhadap arsip dinamis SKPD

Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip

Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan arsip in aktif sesuai dengan kaedah kearsipan, belum melakukan koding, tunjuk silang, daftar arsip, peralatan kurang memadai seperti belum adanya sekat/guide

Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan dan penyimpanan arsip vital seperti penggunaan sarana penyimpanan, metode perlindungan, metode pengamanan arsip vital, lokasi penyimpanan dan penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki jenis arsip terjaga, sehingga tidak melakukan pengolahan dan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan prosedur pemberkasan arsip in aktif secara optimal

Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta masih kurang maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif belum mengadakan fumigasi, pemberian kamper, pest control, pengaturan suhu ruangan, sprinkle, masih kurangnya peralatan alih media dan ruang record center tersendiri

Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip

Kota Administrasi Jakarta Barat belum melaksanakan penataan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana;

Kota Administrasi Jakarta Barat tidak memiliki arsip terjaga sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Kota Administrasi Jakarta Barat belum melakukan pemeliharaan arsip in aktif secara maksimal karna belum melakukan fumigasi, pest control, pengaturan suhu ruang, fire alarm system serta tidak adanya pelaksanaan alih media

Kota Administrasi Jakarta Barat masih kurang baik dalam melakukan layanan dan akses terhadap arsip dinamis SKPD

Kota Administrasi Jakarta Barat belum melakukan penyusutan arsip walaupun sudah ada prosedur pemindahan dan melakukan pemindahan

Kota Administrasi Jakarta Selatan belum melaksanakan penataan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki arsip terjaga walaupun hanya arsip kewilayahan dan arsip masalah pemerintahan yang strategis akan tetapi belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah melakukan pemeliharaan arsip in aktif walaupun tidak maksimal karna belum melakukan fumigasi

Kota Administrasi Jakarta Selatan belum melakukan penyusutan arsip.

Kota Administrasi Jakarta Utara sudah melakukan penataan arsip in aktif diantaranya belum melakukan tunjuk silang, labeling, dan belum dilaksanakannya mekanisme serah/pindah arsip dari unit pencipta ke unit pengolah

Kota Administrasi Jakarta Utara sudah melaksanakan penataan arsip vital hanya belum membuat daftar arsip vital belum tersedianya peralatan penyimpan arsip, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana

Kota Administrasi Jakarta Utara tidak memiliki arsip terjaga sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta

<p>Kota Administrasi Jakarta Utara sudah melaksanakan prosedur pemberkasan arsip inaktif namun tidak optimal</p> <p>Kota Administrasi Jakarta Utara belum melakukan pemeliharaan arsip inaktif</p> <p>Kota Administrasi Jakarta Utara masih buruk dalam melakukan layanan dan akses terhadap arsip dinamis SKPD</p> <p>Kota Administrasi Jakarta Utara belum melakukan penyusutan arsip.</p>
<p>1. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat belum optimal dalam pengelolaan arsip vital diantaranya belum adanya penyusunan daftar arsip vital, penggunaan sarana penyimpanan, peralatan khusus (vaulting), serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana</p> <p>2. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak memiliki arsip perjanjian internasional namun disarankan melakukan identifikasi arsip terjaga khususnya arsip kewilayahan dan melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta</p> <p>3. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah melaksanakan prosedur pemberkasan arsip inaktif walaupun belum secara optimal</p>
<p>Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur Sudah melakukan penataan arsip aktif diantaranya sudah melakukan indeksing, coding, labeling, hanya kurang maksimal karna belum melakukan tunjuk silang arsip, serta belum terlaksananya mekanisme serah/pindah arsip dari unit pencipta ke unit pengolah</p> <p>Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur Sudah melakukan pemindahan arsip sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1379 Tahun 2004 namun belum optimal dalam pengelolaan arsip vital diantaranya belum tersedianya peralatan khusus penyimpanan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana</p> <p>Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur tidak memiliki arsip perjanjian internasional dan belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur masih kurang maksimal dalam pemeliharaan arsip inaktif</p> <p>Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur belum melakukan penyusutan arsip</p>
<p>Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum melaksanakan penataan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana</p> <p>Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum mengidentifikasi arsip terjaga sehingga belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sudah melakukan pemeliharaan arsip inaktif walaupun tidak maksimal karna belum melakukan fumigasi, pemberian kanper, belum adanya pest control, pengaturan suhu ruangan serta belum adanya pelaksanaan alih media</p> <p>Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum optimal dalam melakukan layanan dan akses terhadap arsip dinamis SKPD</p>

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum melakukan penyusutan arsip
<p>Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta belum membuat daftar arsip in aktif dan statis, serta belum terlaksananya mekanisme serah/pindah arsip dari unit pencipta ke unit pengolah</p> <p>Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai tenaga fungsional arsiparis dan belum memiliki tenaga pengolah arsip yang khusus menangani Kearsipan</p> <p>Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai ruang record center, ruang audio Visual, alat pendukung alih media dan belum mempunyai lemari/rak arsip yang memadai</p> <p>Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip</p>
<p>1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan arsip in aktif diantaranya belum melakukan indeksing, koding, tunjuk silang, labeling, serta belum terlaksananya mekanisme serah/pindah arsip dari unit pencipta ke unit pengolah</p> <p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam pengelolaan arsip vital diantaranya belum tersedianya peralatan khusus penyimpanan arsip vital, serta tidak adanya program penyelamatan dan pemulihan arsip apabila terjadi bencana</p> <p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki arsip perjanjian internasional namun belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta masih kurang maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif</p> <p>Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip</p>
<p>Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta belum menyediakan tempat untuk penyimpanan arsip, hanya menggunakan filling cabinet, folder/ordner dan lemari arsip.</p> <p>Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta belum menyerahkan arsip statis yang dimiliki ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah selaku lembaga Kearsipan Daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki 2 (dua) orang tenaga Arsiparis dan itupun tidak sepenuhnya mengerjakan kearsipan dan hanya dibantu tenaga PHL sedangkan formasi menurut Pergub. 134/2014 adalah 10 orang</p> <p>Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai ruangan khusus penyimpanan arsip, tidak adanya pengaturan suhu ruangan</p> <p>Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip</p>
<p>Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta belum menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas dalam pengelolaan arsip Dinamis aktif</p> <p>Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta belum membuat Daftar Arsip, belum adanya penyerahan arsip dari Induk Tata Usaha ke Cabang Tata Usaha</p> <p>Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta belum memiliki tenaga fungsional arsiparis dan SDM yang mengelola arsip</p> <p>Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta belum memiliki ruang record center dan ruang audio visual</p>

Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip
<p>Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam penyimpanan arsip dinamis aktif belum sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 352/2004</p> <p>Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki 2 (dua) orang tenaga fungsional arsiparis, sedangkan formasi menurut Pergub 134/2014 adalah 10 orang</p> <p>Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum memiliki gedung record center dan sarana penyimpanan arsip belum memadai seperti lemari katalog, map gantung</p>
<p>Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyimpanan arsip secara maksimal, contoh arsip masih disimpan didalam ordner belum dipindahkan ke box arsip dan rak arsip</p> <p>Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta hanya mempunyai tenaga arsiparis 1 orang dan petugas yang ada masih belum memahami tatacara menyimpan arsip</p> <p>Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta memiliki arsip perjanjian internasional namun belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta masih kurang maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif</p> <p>Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip</p>
<p>Biro KDH Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai sarana dan prasarana untuk menyimpan arsip dinamis aktif dan seperti filling cabinet khusus, guide</p> <p>Biro KDH Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai tenaga fungsional arsiparis</p> <p>Biro KDH Provinsi DKI Jakarta memiliki arsip perjanjian internasional namun belum melakukan pelaporan arsip terjaga ke BPAD selaku lembaga kearsipan daerah (LKD) tingkat Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Biro KDH Provinsi DKI Jakarta masih kurang maksimal dalam pemeliharaan arsip in aktif</p> <p>Biro KDH Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip</p>
<p>Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan arsip in aktif, belum membuat daftar arsip dinamis aktif dan in aktif serta belum terlaksananya mekanisme serah/pindah arsip dari unit pencipta ke unit pengolah</p> <p>Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai tenaga fungsional arsiparis dan belum memiliki tenaga pengolah arsip yang khusus menangani Kearsipan</p> <p>Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai ruang record center, ruang audio Visual, alat pendukung alih media dan belum mempunyai lemari/rak arsip yang memadai</p> <p>Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.</p>
Biro Umum Provinsi DKI Jakarta belum memiliki ruang audio Visual

Sekretaris Dewan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penataan arsip in aktif, serta belum terlaksananya mekanisme serah/pindah arsip dari unit pencipta ke unit pengolah

Sekretaris Dewan Provinsi DKI Jakarta baru mempunyai calon tenaga fungsional arsiparis dan belum memiliki tenaga pengolah arsip yang khusus menangani Kearsipan

Sekretaris Dewan Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada contoh lemari arsip elektronik (kardex) sudah ada tapi belum digunakan, filling cabinet dan lemari arsip

Sekretaris Dewan Provinsi DKI Jakarta belum melakukan penyusutan arsip.

Unit kearsipan pada Satpol PP belum membuat daftar arsip SKPD

Belum dilaksanakannya pemidahan dari unit pengolah ke unit kearsipan sehingga arsip masih menumpuk di bidang kerja masing-masing

Arsiparis tidak dipekerjakan secara khusus sebagai pengelola arsip

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan terutama lemari simpan

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. Tinia Budiati, M.A.
NIP 195909301986102001

**REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2016**

N0	SKPD	NILAI
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	85,47
3	Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan	78,21
7	Dinas Kesehatan	63,69
9	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	63,13
11	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	51,40
12	Dinas Perindustrian dan Energi	57,54
14	Dinas Kebersihan	56,98
16	Dinas Bina Marga	55,31
17	Dinas Tenaga Kerja	54,75
28	Dinas Tata Air	49,72
30	Dinas Pendidikan	47,49
31	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Perdagangan	46,93
37	Dinas Tata Ruang	38,82
39	Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan	37,42



KET
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Buruk
Buruk
Buruk
Buruk
Buruk

REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN
SKPD : BADAN
TAHUN 2016

N0	SKPD	NILAI
1	Badan Kepegawaian Daerah	70,39
2	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal	57,54
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54,19
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	53,07
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51,96
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan dan Keluarga Berenca	50,28
7	Badan Pengelolaan Lingkungan Hudip Daerah	37,43
8	Badan Pelayanan Pengadaan Barang	36,87



KET
Cukup
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Buruk
Buruk
Buruk

REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN
SKPD : WALIKOTA
TAHUN 2016

N0	SKPD	NILAI
1	Walikota Administrasi Jakarta Pusat	67,04
2	Walikota Administrasi Jakarta Timur	65,36
3	Walikota Administrasi Jakarta Selatan	63,69
4	Walikota Administrasi Jakarta Barat	45,25
5	Walikota Administrasi Jakarta Utara	44,71
6	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	53,07



KET
Cukup
Cukup
Cukup
Buruk
Buruk
Kurang

REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN
UKPD : BIRO
TAHUN 2016

N0	SKPD	NILAI
1	Biro Umum	85,29
2	Biro Hukum	60,59
3	Biro Perekonomian	52,51
4	Biro Tata Pemerintahan	51,96
5	Biro KDH	42,35
6	Biro Organisasi dan Reformasi	48,04
7	Biro Pendidikan dan Metal Spritual	45,25
8	Biro Administrasi Keuangan dan Aset Pemda	41,90
9	Biro Kejahteraan Sosial	31, 84



KET
Baik
Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Buruk
Buruk
Buruk
Buruk

REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN
SKPD : LEMBAGA LAIN
TAHUN 2016

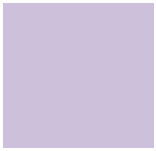
N0	SKPD	NILAI
15	Inspektorat	56,42
26	Satpol PP Prov DKI Jakarta	50,28



KET
Kurang
Buruk

**REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2016**

N0	SKPD	NILAI
1	Biro Umum	85,29
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	85,47
3	Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan	78,21
4	Badan Kepegawaian Daerah	70,39
5	Walikota Administrasi Jakarta Pusat	67,04
6	Walikota Administrasi Jakarta Timur	65,36
7	Dinas Kesehatan	63,69
8	Walikota Administrasi Jakarta Selatan	63,69
9	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	63,13
10	Biro Hukum	60,59
11	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	51,40
12	Dinas Perindustrian dan Energi	57,54
13	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal	57,54
14	Dinas Kebersihan	56,98
15	Inspektorat	56,42
16	Dinas Bina Marga	55,31
17	Dinas Tenaga Kerja	54,75
18	Sekretaris Dewan	54,71
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54,19
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	53,07
21	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	53,07
22	Biro Perekonomian	52,51
23	Biro Tata Pemerintahan	51,96
24	Biro KDH	42,35
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51,96
26	Satpol PP Prov DKI Jakarta	50,28
27	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana	50,28
28	Dinas Tata Air	49,72
29	Biro Organisasi dan Reformasi	48,04
30	Dinas Pendidikan	47,49
31	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Perdagangan	46,93
32	Biro Pendidikan dan Metal Spritual	45,25
33	Walikota Administrasi Jakarta Barat	45,25
34	Walikota Administrasi Jakarta Utara	44,71
35	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44,29
36	Biro Administrasi Keuangan dan Aset Pemda	41,90
37	Dinas Tata Ruang	38,82
38	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	37,43
39	Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan	37,42
40	Badan Pelayanan Pengadaan Barang	36,87
41	Biro Kesejahteraan Sosial	31,84

[illegible]